**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Ekonomi Politik Internasional dipahami sebagai sebuah kajian yang mempelajari interaksi antara pasar dan negara. Interaksi yang terjadi antara negara dan pasar dapat terlihat dari aspek kebijakan Pemerintah dalam mengoptimalkan atau bahkan melindungi kegiatan ekonomi domestik demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai salah satu aktor internasional, negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yang dituangkan melalui aspek kepentingan nasional (*national interest*). Penentuan kepentingan nasional merupakan hasil dari refleksi masyarakat, sehingga negara dapat menentukan langkah-langkah kebijakan ekonomi demi mencapai kemakmuran tersebut.[[1]](#footnote-2)

 Kepentingan nasional suatu negara ditentukan oleh interaksi domestik, regional dan internasional. Untuk Indonesia, penentuan kepentingan nasional dapat terlihat dari dinamika kawasan asia tengara. Aspek persaingan di asia tenggara cenderung dinamis, sehingga mempengaruhi hidup dan prilaku Negara, khususnya Indonesia. regionalisme merupakan satu-satunya renspon yang efektip untuk menghadapi tantangan dari suatu pendalaman polarisasi yang dihasilkan oleh globalisasi.

 Salah satu bentuk persaingn pasar dan interaksi di asia tenggara terlihat dari pembentukan ASEAN. Gagasan terbentuknya ASEAN merupakan ide atau konsep regionalism.

 ASEAN yang pada awal pembentukannya pada tahun 1967,[[2]](#footnote-3) lebih ditujukan pada kerjasama yang berorientasi politik untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ASEAN mulai mengalami perubahan yaitu kerjasama regional dengan memperkuat semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. agenda ASEAN kini lebih kepada percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya-dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera dan damai.

 ASEAN secara resmi dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, dengan lima negara inisiator yaitu; Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. legal formal atas terbentuknya ”Deklarasi Bangkok” yang ditanda tangani secara bersama-sama. secara umum deklarasi tersebut berisi:

**”Membentuk suatu landasan kokoh dalam meningkatkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dengan semangat keadilan dan kemitraaan dalam rangka menciptakan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran kawasan”**.[[3]](#footnote-4)

 Saat ini keanggotan Asean bertambah menjadi 10 negara, masuknya Brunei Darussalam tahun (1984), Vietnam tahun (1995), Laos tahun (1997), Myanmar tahun (1997), dan Cambodia tahun (1999).- memperlihtkan bentuk semamgat regionalisme di asia tenggara semakin meningkat.

 Bentuk semangat regionalism dipertegas oleh kerangka *Asean Community* pada tahun 2015. Tujuan dari *Asean Community* merupakan bentuk semangat dari integrasi dikawasan Asia Tenggara. Secara umum, agenda integrasi *Asean Community* terdiri dari 3 pilar.

 Tiga pilar *Asean Community* tersebut adalah: **(A)***Asean Political Security Community* (APSC); **(B)***Asean Economic Community* (AEC); dan **(C)***Asean Socio-Cultural Community* (ASCC).[[4]](#footnote-5) Namun diantara ketiga pilar tersebut, *Asean Economic Community* (AEC) atau sering disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), terus mengemuka di kalangan masyarakat, media, pelaku usaha, budayawan, dan juga pemerintah. karena MEA sendiri merupakan integrasi ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi yang terintegrasi (*single production*) pada kawasan ASEAN.

 Penelitian ini akan berfokus pada pilar MEA. Dengan melihat dinamika integrasi ekonomi. Integrasi tersebut dilakukan dengan menerapkan liberalisasi perdagangan antara negara yang berpartisipasi. Sedangkan disisi lain, ASEAN memberlakukan berbagai hambtan-hambatan bagi negara-negara diluar ASEAN. Tujuanya adalah untuk menghadapi arus globalisasi yang berpotensi mengancam ekonomi kawasan.

 Integrasi tersebut digunakan sebagai alat untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Didasari keyakinan tersebut, sekaligus untuk memperkuat daya saing kawasan dalam menghadapi kompetisi global dan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN telah menyepakati untuk meningkatkan proses integrasi diantara mereka melalui pembentukan MEA 2015.

MEAyang merupakan pilar menuju integrasi ekonomi di ASEAN yang bertujuan untuk membangun kemitraan demi kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN.[[5]](#footnote-6) Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui MEA, maka dibuatlah AEC *Blueprint.*

AEC *Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas, (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce,* (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.[[6]](#footnote-7)

Dengan adanya AEC *Blueprint* tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN mulai menyesuaikan ekonomi dan pasar untuk tercapainya MEA, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong perekonomian domistik dengan daya saing bertaraf internasional. Salah satu upaya yang diambil oleh negara-negara ASEAN untuk menghadapi atau menyesuaikan perekonomin dalam menghadapi MEA, yaitu dengan menerapkan *economic zone* (zona ekonomi).

 Zona ekonomi merupakan suatu strategi sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia, yang dipromosikan oleh pemerintah nasional, regional, dan lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Zona Ekonomi terdiri dari 5 tipe yaitu : *Industrial Park* (IP), *Special Economic Zone* (SEZ), *EcoIndustrial Park* (EIP), *Technology Park* (TP), *and Innovation District* (ID).[[7]](#footnote-8)

 Berdasarkan *United Nation International Development Organization* (UNIDO) pada bulan mei 2015 terdapat 1000 lebih zona ekonomi (*economic zoneI*) yang sudah diterapkan oleh negar-negara ASEAN (893 *industrial park*, 84 *Special Economic Zone*, 2 *EcoIndustrial Park*, 25 *Technology Park*, dan 1 *Innovation District*). Sebutsaja Vietnam telah banyak mengandalkan *industrial park* untuk menarik *foreign direct investment* (FDI), Malaysia yang akan memasuki *EcoIndustrial Park* dan singapura yang sudah menjalankan zona ekonomi pada tahapan *Innovation District.[[8]](#footnote-9)*

 Dengan adanya kemunculan zona ekonomi (*economic zone*) yang di terapkan oleh negara-negara ASEAN sebagai pembendung atau untuk menghadapi arus liberalisasi pasar yang diberlakukan oleh AEC, maka untuk menghadapi itu semua indonesia menerapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri (*Economic Foreign Policy*) setidaknya yang mampu bersaing dengan Negara ASEAN diEra MEA.[[9]](#footnote-10)

 Pada awal dideklarasikanya MEA pada tahun 2003 di Bali (**Bali Concord II**), tahun 2009 presiden indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan keputusan untuk pembangunan ekonomi dengan menerapkan KEK. KEK terlihah disiapkan untuk menghadapi MEA ditahun 2015.

 Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi domestik - tercermin dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Secara garis besar, keputusan tersebut bertujuan menarik investasi sebanyak mungkin dalam rangka membangun ekonomi nasional dengan melibatkan setiap daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Daerah yang ditetapkan sebagai KEK merupakan satu wilayah hukum untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.[[10]](#footnote-11)

 KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dayasaing internasional. Dan terdiri atas satu atau beberapa kegiatan ekonomi seperti: pengolahan ekspor; logistik; industri; pengembangan teknologi, pariwisata, energi; dan kegiatan ekonomi lain.[[11]](#footnote-12)

 Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.[[12]](#footnote-13)

 Suatu daerah yang ingin dibentuk menjadi KEK dapat diusulkan melalui Dewan Nasional, dan pengusulan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha. pemerintah kabupaten/kota. dan pemerintah provinsi.[[13]](#footnote-14)

 Pertama kali KEK diselenggarakan pada tahun 2009 hingga saat ini 2017. Setidaknya ada 11 wilayah KEK yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu: Arun lhokseumawe, Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Tanjung Api-Api, tanjung kelayang, Palu, mandalika, Bitung, Sorong, Morotai, dan Maloy Batuta trans Kalimantan.[[14]](#footnote-15)

 KEK merupakan konsep terkecil dari zona ekonomi, mengutip sedikit rumusan dari UNIDO, setidaknya model KEK/SEZ adalah tahap kedua dari lima tahapan *Ecomic Zones.* Masing-masing tahapan memiliki karakteristik yang khas, baik dari aspek regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga kepada *goals* yang hendak dicapai. Singkatnya, model *Economic Zones* berdasarkan UNIDO dapat digambarkan seperti sebuah proses pembangunan – yang terlihat cenderung sama dengan model pembangunan ekonomi klasik milik W.W Rostow *(Linear stage theory).* Berikut kelima tahapan *Economic Zones* menurut UNIDO:

Innovation District

Technology Park

EcoIndustrial Park

SPECIAL ECONOMIC ZONE

INDUSTRIL PARK

Sumber : united nations industrial development organization (UNIDO), *Economic Zone In Asean*

**Gambar 1.1. Tahapan Model Pembangunan Ekonomi (*Economic Zone*)**

 Konsep KEK *(Special economic zones),* terlihat berada pada tahapan kedua dari lima tahap *Economic zones.* Pada tahap pertama dan kedua, model tersebut kerap diterapkan oleh kota-kota di negara berkembang. Sehingga, Indonesia secara prinsipal memang ideal untuk menerapkan konsep KEK sebagai model pembangunan ekonomi. Salah satu karakteristik yang perlu dipenuhi oleh penerapan konsep KEK terdiri dari beberapa elemen, seperti: (1) Tersedianya bahan mentah *(row material),* (2) Infrastruktur pendukung, (3) Insentif kebijakan bagi para investor, (4) Mitra *stakeholder –* swasta atau BUMN*,* dan (5) Badan khusus untuk promosi.

 Beberapa elemen tersebut adalah bagian dari instumen untuk pengembangan KEK yang berkelanjutan. Wilayah dengan potensi bahan mentah (baik industri manufaktur maupun pariwisata) menjadi syarat mendasar dalam penerapan model KEK. Sama halnya dengan tahap *Industrial park,* di mana bahan mentah harus tersedia di wilayah yang ingin dikembangkan. Selain itu, pada *Industrial park* – aspek infrastruktur mendasar seperi jalanan, energi dan sumber daya manusia harus tersedia untuk menopang jalannya *Industrial park.* Namun, pada tahapan KEK, instumen pendukung untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan masih perlu ditambah lagi.

 Setidaknya, penerapan KEK harus telah memenuhi dua syarat mendasar seperti halnya *Industrial park.* Tetapi tak hanya di situ, KEK juga harus didukung oleh infrastruktur lanjutan, seperti: aspek transportasi - untuk mobilisasi barang dan jasa demi percepatan roda perekonomian di wilayah KEK. Kemudian, KEK juga perlu memberikan fasilitas kemudahan investasi, yang kerap dikenal dengan insentif kebijakan. Salah satu bentuk insentif kebijakan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal penting lainnya adalah Pemda memiliki mitra stragetis (pihak swasta dan BUMN) untuk ikut membangun sarana dan prasarana di wilayah KEK. Sedangkan untuk bagian promosi, Pemda setidaknya mempersiapkan tim untuk melakukan promosi dan sosialisasi atas potensi ekonomi yang tersedia.

 Beberapa instrumen di atas memiliki karakteristik yang jelas ideal bagi negara-negara berkembang. Namun, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah persaingan antar negara anggota Asean. Di mana, penerapan *Economic* zones juga menjadi agenda pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Singapura, yang mana model pembangunan *Economic zones* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Singapura berada pada tahap *Eco-industrial park,* dan saat ini mulai menuju *Technology park.* Pembangunan ekonomi di Singapura telah berada pada tahap mobilisasi finansial sebagai fasilitas kemudahan untuk penerapan *Economic zones.* Beberapa industri yang ada telah mengalami „metafora‟ – dengan beralih kepada bisnis keuangan dan pasar saham. Hal itu merupakan tahapan menengah untuk mengantarkan sebuah negara berada pada titik modernisasi ekonomi.

 Sedangkan untuk mempertimbangkan beberapa negara ASEAN yang menerapkan model KEK, Pemerintah Indonesia perlu “melihat‟ kesiapan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Beberapa negara ASEAN tersebut juga menjadi daya tarik bagi para investor sebagai destinasi investasi di berbagai bidang (seperti pariwisata dan manufaktur).

 Mengingat bahwa persaingan negara-negara ASEAN pada tingkatan MEA mencakup berbagai macam bidang seperti : aliran bebas barang, aliran bebas dari layanan, arus bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, arus bebas tenaga kerja yang terampil, dan persaingan infrastruktur. Selain itu, pasar tunggal dan berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting, yaitu, sektor integrasi prioritas, dan makanan, pertanian dan kehutanan.

 Secara umum pemaparan atas tingkat persaingan MEA serta penerapan KEK Indonesia, merupakan fokus utama dari penelitian ini. Era yang penuh dengan aspek persaingan mengharuskan Indonesia menerapkan model pembangunan yang komprehensip untuk menghadapi ke-9 negara asean lainya. Faktanya penerapan KEK, secara produk hukum KEK diterbitkan pada tahun 2009 yang artinya sudah berjalan 8 tahun hingga samapai saat ini (tahun 2017).

 Sejauh ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan 11 wilayah KEK.[[15]](#footnote-16) Ke-11 wilayah tersebut dianggapa mampu menjadi dayatarik FDI dipasar investasi global. Namun kesiapan atas penerapan KEK perlu diukur, karena 9 negara asean lainya juga menerapkan model pembangunan *Economic Zone* (zona ekonomi).

 Maka muncul pertanyaan penelitian yang terpusat pada peningkatan dayasaing disektor investasi melalui kerangka KEK.

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**
2. Bagaimana program KEK dapat menarik investasi asing (FDI),di Indonesia ?
3. Bagaimana daya saing indonesia pada sektor investasi asing (FDI) di era MEA ?
4. Bagaimana program KEK mampu meningktkan daya saing Indonesia untuk menghadapi MEA pada sektor invetasi di antar negar-negara anggota asaen lainya ?
5. **BATASAN MASALAH**

 Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai peningkatan daya saing indonesia di ASEAN

1. **RUMUSAN MASALAH**

 Agar memudahkan penulis dalam menganalisis suatu penulisan maka diperlukan adanya perumusan masalah yang berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah dipaparkan penulis : Bagaimana penerapan model pembangunan Ekonomi melalui penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam menghadapi persaingan investasi di Era Masayarakata Ekonomi Asean (MEA) ?

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
2. **Tujuan penelitian**

 Adapun tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemudahan dan fasilitas apa saja yang diberikan oleh KEK untuk menarik minat investasi asing (FDI).
2. Untuk mengetahui posisi Indonesia dalam persaingan investasi di ASEAN.
3. Untuk mengetahui keunggulan KEK dalam pembangunan ekonomi yang berdaya saing bagi negara.
4. **KEGUNAAN PENELITIN**

 Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang paling berkaitan satu sama lain dalam berabgai peristiwa atau masalah dan fenomena nasionl maupun internasional khsusunya dalam penerapan kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai alat untuk menghadapi arus liberalisasi pasar yang dijalankan perhimpunan ASEAN dengan menerapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran pada bidang ekonomi politik internasional khususnya pada pokok pembahasan yang sedang dibahas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan dn sebagai bahan perbandingan bagi peneliti sejenis aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding program strata stu (S1) pada jurusan hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dam ilmu politik, universitas pasundan.
4. **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**
5. **Kerangka pemikiran**

 Ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis legalitas dan efesiensi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kaitannya sebagai setrategi dalam mengahadapi persaingan diera MEA antar negara intra-Asean. begitupila kaitanya pada pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Beberapa teori tersebut adalah :

 Hubungan Internasional merupakan kajian yang dapat dikatakan sebuah ilmu baru. Ilmu Hubungan Internasional pada dasarnya mempelajari mengenai bentuk interaksi antar negara dan bangsa berdaulat yang melewati batas-batas teritorialnya. Hubungan Internasional pada awalnya hanya bentuk kontak atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional yang mengalami transformasi akan isu-isu di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan.

Adapun definisi dari hubungan internasional itu sendiri dijelaskan, oleh K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis, yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda, menggambarkan hubungan internasional sebagai berikut :

**“Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian politik luar negeri atau politik internasional, meliputi segala kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata transfortasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[16]](#footnote-17)**

 Namun setelah berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu low politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme).

 Menurut. Anak Agung Banyu Perwita &. Yanyan Mochamad Yani dalam bukuny a Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

**"Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional”** (Perwita & Yani).[[17]](#footnote-18)

Berdasarkan pemaparan hubungn internasional menurut para ahli di atas, kita dapat melihat Paska usainya perang dingin Negara-negara mulai beralih pada *low politic* salah stunya yaitu ekonomi.

Negara dan pasar dalam perkembangannya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ekonomi adalah hal yang erat kaitannya dengan pencapaian kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam level internasional, negara dan pasar adalah inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen).

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “*branch of science of a statesman or legislator*” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin). Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaks antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas’oed).

Ekonomi Politik Internasional dipahami sebagai sebuah kajian yang mempelajari interaksi antara pasar dan negara. negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yang dituangkan melalui aspek kepentingan nasional (*national interest*). Penentuan kepentingan nasional merupakan hasil dari refleksi masyarakat, sehingga negara dapat menentukan langkah-langkah kebijakan ekonomi demi mencapai kemakmuran tersebut.[[18]](#footnote-19) Kepentingan nasional suatu Negara dapat ditentukan melalui interaksi regional.

 Diakui secara luas, argumen yang paling mendukung dalam integrasi regional adalah manfaat memperluas pasar dan mempromosikan kompetisi dengan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Kesejahteraan ekonomi meningkat ketika sumber daya yang sebelumnya dipakai dalam produksi dalam negeri yang mahal secara efisien dialokasikan kembali ke arah keuntungan komparatif negara dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar

 . Grugel dan Hout mengungkapkan bahwa regionalisme adalah proyek yang dibuat oleh negara, untuk mengorganisir ruang geo-ekonomi.[[19]](#footnote-20) Regionalisme dapat menjadi sarana untuk mengetahui keadaan negara lain, atau bahkan mengontrol negara dekatnya, sehingga kepentingan negara yang lain bisa saling tergorganisir. Anthony Payne mendefinisikan regionalisme sebagai “*a state-led or states-led project designed to recognize a particular regional space along defined economic and political lines*”[[20]](#footnote-21) Definisi tersebut menggambarkan bahwa regionalisme merupakan sebuah proyek yang dipimpin oleh suatu negara, atas negara yang lain, untuk mengenali ruang wilayah lainnya dan didasarkan garis ekonomi, maupun politik.

 Regionalism merupakan cara yang efektif untuk untuk memenuhi kepentingan suatu Negara dangn cara berinterksi dengan Negara-negara yang berada disatu kawasan. Persamaan kepentingan tiap Negara di regional akan berujung kepada integrasi ekonomi.

 Menurut Tinbergen, integrasi ekonomi merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan jalan menghapuskan semua hambatanhambatan (barriers) bekerjanya perdagangan bebas dengan jalan mengintroduksi semua bentukbentuk kerjasama dan unifikasi.[[21]](#footnote-22) Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara non-anggota dalam melakukan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak penciptaan (trade creation) dan dampak pengalihan (trade diversion) (Salvator).

 Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi, yang didasarkan pada keuntungan komparatif (Lapipi).

 Integrasi ekonomi di Asia Tenggara ditunjukan oleh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mea merupkan integrasai ekonomi yang menerpkan perdagangan barang dapat dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif. dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang berintegrasikan dalam membangun ekonomi yang merata dan dapat pula mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

 Selain itu MEA juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang setara dengan negara anggota-anggota ASEAN dan untuk membuat ASEAN menjadi sebuah kawasan ekonomi yang sangat kompetitif yang akan sepenuhnya dapat terintegrasi dalam ekonomi global

 Dengan kemunculanya MEA yang competitive maka Negara-negara asean lainya mulai menyesuaikan perekonomian dalam negerinya, salah satunya yaitu dengan menerapkan zona ekonomi (*economic zone*), Zona ekonomi merupakan suatu strategi landasan untuk pembangunan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia yang dipromosikan oleh pemerintah nasional, regional, dan lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Zona Ekonomi terdiri dari 5 tipe yaitu : *Industrial Park* (IP), *Special Economic Zone* (SEZ), *EcoIndustrial Park* (EIP), *Technology Park* (TP), *and Innovation District* (ID)

 untuk mengukur keberhasilan pembangunan zona ekonomi yang dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainya, Michael Porter dalam bukunya *“the competitive advantage of nations”.* Merumuskan Konsep keunggulan kompetitif suatau Negara, menyatakan bahwa ada empat atribut yang menentukan dalam persaingan internasional. Keempat atribut tersebut adalah:

* *factorial condition* ( kondisi faktoril ), yaitu kondisi suatu Negara dalam faktor-faktor produksi (tenaga kerja terampil, infrastruktur, teknologi, yang dibutuhkan untuk bersaing dalm industry tertentu.
* *Demand condition* (kondisi permintaan), yaitu sifat permintan domestikatas produksi atau jasa industry tertentu.
* *Related and supporting industries* (Industry pendukung dan terkait).Kehadiran industry pendukung / penyuplai atau industry yang memiliki keterkaitn (related industries) dan memiliki kemampuan internasional.
* *Firm strategy, structure, and trivalry*(Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan) yakni kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisir, dan dikelola, serta sifat persaingan domestik.

 Keempat atribut tersebut diharapkan mampu menjadi bahan ukuran suatu Negara yang akan bersaing di tinggkat internasional. Suatu keputusan Negara dalam menetapkan kebijkan ekonomi luar negerinya sangat mempengaruhi apakah Negara dpat bersaing atau tidak. Maka dibutuhkan suatu pengkajian mengenai Negara dalam mengambil kebijakan ekonomi luar negeri.

 Menurut G. John Ikenberry, “*Introduction Approaches to Explaining American Foreign Economic Policy”*, terdapat tiga pendekatan teori dalam menganalisa sebuah *Economic Foreign Policy* atau kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara. Dalam prosespengambilan kebijakan ekonomi luar negeri negara tersebut, negara dipengaruhi oleh tigapendekatan teori *System-centered, State-centered,* dan *Society-centered.*

*SYSTEM- CENTERED*

*SOCIETY-CENTERED*

*STATE-CENTERED*

*ECONOMIC FOREIGN POLICY*

**Gambar 1.2. Kerangka Teoritis John Ikenberry**

(Gambar merupakan hasil pengolahan teori oleh penulis)

Pendekatan pertama. Secara umum, pendekatan *System-centered* melihat interaksi ekonomi negara dalam tatanan internasional, Interaksi ekonomi dalam tatanan internasional tersebut berfokus pada aktor negara *(state-state).* Begitupun dengan Indonesia bisa kita terlihat aspek dari *system-centered*-nya dalam pengambilan Kebijakan Ekonomi Luar Negerinya yang tercerminkan dalam penerapan pembangunan KEK, pertimbangan pengambilan kebijakan tersebut tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi internasional khususnya di kawasan ASEAN dengan adanya penerapan MEA ditahun 2015, yang mengharuskan tiap Negara anggota bersaing diberbagi aspek, baik investasi maupun tenaga kerja.

Pendekatan kedua yang menjadi perspektif untuk menganalisis kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia dengan menetapkakn KEK adalah melalui *State-centered.* Pendekatan *State-centered* merupakan sebuah pendekatan yang melihat dinamika ekonomi politik domestik sebuah negara dalam proses pengambilan kebijakan. Level analisis yang dilihat dalam pendekatan ini adalah interaksi yang terjadi antara pemerintahan pusat dan kelompok pelaku bisnis, serta kelompok politik lainnya dalam sebuah Negara.

Pemikiran Ikenberry terkait pendekatan *State-centered,* menekankan bahwa dinamika ekonomi politik domestik juga menentukan proses pengambilan kebijakan. Seperti dalam pola interaksi antara birokrat, kelompok pelaku bisnis, hingga kelompok politik, yang sudah teratur diundang-undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, ketentuan umum dalam penyelenggaraanya yang tertera pada pasal 1.[[22]](#footnote-23)

|  |
| --- |
| president |
| NASIONALDewan Nasional |
| DEWAN KAWASAN PROVINSI 2DEWAN KAWASAN PROVINSI 1PROVINSI |
| ADMINISTRATOR KEK DADMINISTRATOR KEK CADMINISTRATOR KEK BADMINISTRATOR KEK AKAB / KOTABADAN USAHA KEK CBADAN USAHA KEK CBADAN USAHA KEK BBADAN USAHA KEK A |

Sumber *: Centre For Strategic And International Stadies.* Kawsan ekonomi khusus dan strategi Indonesia : tinjauan atas peluang dan tantangan

**Gambar 1.3. Hubungan Kelembagaan Dalam Pengelolan Kawasan Ekonomi Khusus**

 Terdapat empat institusi kunci yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda pada tingkatan pemerintahan masing-masing: Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pengelola KEK.

 Pada tingkatan nasional, program pengembangan KEK berada di bawah tanggung jawab Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional KEK ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dewan tersebut antara lain menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk pengembangan KEK di tingkat nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengkaji serta memberi rekomendasi pemberian status KEK. Dewan ini juga bertugas untuk menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK. Untuk itu dewan ini berhak meminta penjelasan berbagai lembaga lainnya di tingkat wilayah dan pengelola kawasan.

 Sementara itu, di tingkat provinsi, institusi kunci KEK dinamakan Dewan Kawasan, yang diketuai oleh Gubernur. Tugas Dewan Kawasan antara lain membentuk Administrator KEK, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan operasional KEK, serta menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap tahun.[[23]](#footnote-24)

 Keterkaitan tersubut diharapkan dapat menggali setiap potensi wilah yang akan dikembangkan menjadi KEK untuk mendukung *Master Plan* Indonesia, demi mensukseskan kegiatan pembanguan ekonomi Negara Indonesia.

 Pendekatan ketiga adalah *Society-centered,* pendekatan ini melihat dari sisi kelompok masyarakat (yang memiliki legalitas) untuk melihat pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi sebuah negara. Persperktif *Society-centered* yang ditawarkan oleh Ikenberry adalah untuk melihat peran dan fungsi kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara.

 Pembangunan KEK tidak hanya melihat dari pendekatan *system-centered* dan *state-centered* saja, tetapi faktor *society-centered* pun cukup kuat dalam penentuan pembuatan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah Negara agricultural, maka pembangunan KEK sangat banyak melibatkan peran masyrakat khususnya para petani dan nelayan yang memiliki berbagai keunggulan dari hasil pertanian dan perikananya yang mampu memberikan subangsi yang besar bagi masyarakat global. Seperti hasil perkebunan kelapa sawit, karet dan perikanan.

 Berdasarkan pemaparan diatas menurut M. Porter melalui 3 pendekatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri. Penulis berpendapat bahwa KEK merupakan pengambilan keputusan yang tepat untuk menghadapi sistem perekonomian internsional yang semakin liberal. Khususnya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

 KEK sendiri merupakan konsep kecil dari zona ekonomi yang terdiri dari lim tahapan, konsep tersebut sejalan dengan teori pembanguan ekonomi yang dikenbangkan oleh rostow yang sama-sama mempunyai lima tahap pembangunan, sering dikenal dengan nama *linier stage theory*

 Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow merupakan literature ekonomi yang paling luas beredar dan banyak menjadi acuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan modernisasinya (Jhingan, 149: 2000).

 *Walt Whitman Rostow (7 Oktober 1916 – 13 Februari 2003) adalah* seorang ahli sejarah ekonomi asal Amerika Serikat, yang pada tahun 1960-an *menulis sebuah buku The Stages of Economic Growth, A Non-Communist* *Manifesto*. Buku ini mengurai sejarah perkembangan ekonomi Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan analisis historis.[[24]](#footnote-25)

 Menurut Rostow pembangunan ekonomi berlangsung secara betingkat-tingkat dengan lima tahapan yang dijabarkan dalam teorinya, yaitu: 1) *The traditional society* (Masyarakat tradisional); 2) *The precondition for take off* (Pra kondisi lepas landas); 3) *The take off* (Lepas landas); 4) *The drive to maturity* (Pendewasaan); dan 5) *The age of high mass consumption* (Zaman konsumsi masa besar-besaran) (Rostow, 4: 1993)

The drive to maturity

The age of high mass consumption

The take-off

The praconditional take-off

The traditional society

Sumber : the economic history review. Second series, vol, xii, No 1. [online], http//www.jstor.org/

**Gambar 1.4. Tahap Pembangunan Ekonomi Menurut Rostow**

 Tahap pembangunan rostow sejalan dengan tahap pembangunan bardasarkan unido yang mana di tahap keduanya sama-sama adanya pembaruan teknologi dibidang industry yang inovatif dan berusaha menarik minat investasi sebanyak mungkin dalam menciptakan pembangunan ekonomi di sutu Negara.

 Usaha pemerintah untuk mendapatkan itu semua dituangkn dalam kerangka kebijkan KEK. Menurut World Bank, KEK dalam segala bentuknya terdiri atas, sedikitnya, area yang secara geografis dibatasi dengan area kepabeanan yang terpisah, dibawahi oleh sebuah badan pengatur, dan di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang berlokasi di dalam kawasan (Akinci & Crittle). Dengan kata lain, KEK adalah sebuah zona di mana pemerintah berharap untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi dengan menyediakan berbagai keunggulan kompetitif bagi entitas yang memilih untuk berlokasi di dalam zona.

1. **HIPOTESIS**

 Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **jika** **kawasan ekonomi khusus (kek) dapat mengoptimalkan potensi daerah maka, daya saihng investasi indonesia diera masyarakat ekonomi asean (mea) akan semakin meningkat.**

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Metode penelitian**
3. ***Metode deskriptif analisis***

 Secara harfih, metode ini adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti berusha untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena aktual seputar “penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai model pembangunan ekonomi di Indonesia, dalam upaya menghadapi persaingan investasi diera Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

1. **Variabel penelitian dan oprasionalisasi variabel**
2. **oprasional variabel dan indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesisi (Teoritik) | Indicator(Empiric) | Verivikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas :KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAPAT MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH | 1. persaingan menarik investasi atar anggota asean
2. promosi KEK Indonesia
3. kemudahan berinvestasi di KEK
 | 1. Aaean economic community. <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf>.
2. BKPM dan PT. Banten West Java Tourism Development kepada sekitar 40 pebisnis dan investor Shanghai dalam acara kegiatan Promosi dan Sosialisasi KEK yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 di Shanghai, China.

<http://www.kemlu.go.id/shanghai/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Kawasan-Ekonomi-Khusus-Tanjung-Lesung-dan-Sei-Mangkei-di-Shanghai.aspx> 1. Mendorong Investasi Melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK**).** http://www.bkpm.go.id/id/artikel-investasi/readmore/mendorong-investasi-melalui-kawasan-ekonomi-khusus-kek
 |
| Variabel Terikat:DAYA SAING INVESTASI INDONESIA DIERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) AKAN SEMAKIN MENINGKAT | 1. Sebelas kawasan ekonomi khusus
2. Kelembagaan ( administrator Kawasan Ekonomi Khusus )
 | 1. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia http://kek.go.id/
2. Dengan adanya administrator, memberikan kemudahan bagi investor untuk merealisasikan investasinya di KEK. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3505084/ini-penyebab-kawasan-ekonomi-khusus-kurang-dilirik-investor>
 |

**Tabel 1.1. Oprasionl Variable Dn Indikator**

1. **Skema krangka teoritis**

KEK

*REGIONALISM*

ASEAN

*ASEAN COMMUNITY*

MEA

*COMPETITIVE ADVENTAGE*

*ECONOMIC FOREIGN POLICY*

*SYSTEM-CENTERED*

*SOCIETY-CENTERED*

*STATE- CENTERED*

PENG

1. **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

 Untuk mempermudah dan mengurangi kesalah dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. **Studi kepustakaan**

 Teknik pengumpulan data dengn mengadakan penelahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubunganya dengan maslah yng dipecahkan.

1. **Teknik analisa data**

 Dibutuhkan suatu teknik analisis dalam sebuah penulisan karena salah satu kunci keberhasilan analisa yg tajam dan tepat ditentukan oleh tingkat analisa (*level of analysis*). Level analisa berguna untuk dasar pemilihan dan penentuan teori yang akan digunakan. Penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. **Teknik analisa induksionis**

 Dalam penulisan ini menggunakan analisis induksionis dengan menempatkan varibel dependent yaitu “persaingan investasi diera Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. sebagai unit analisa, dan menempatkan variabel independent yaitu “penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai model pembanguan ekonomi, dalam upaya meningkatkan *competitive advantage* Indonesia” sebagai unit eksplanasi.

1. **Lokasi dan lama penelitian**
2. **Penelitian**

 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis mendatangi lokasi-loksi sebgai berikut :

* Perpustakaan FISIP universitas pasundan
1. **Lama penelitian**

Penelitian ini akn dilaksanakan pda kurun waktu 1 bulan, terhitung sejak bulan 1 januari 2017 s/d 1 februari 2017

1. **Sistemtika penulisan**
* BAB I : menguraikan latarbelakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis.
* BAB II : menguraikan bagaimana persaingan diera Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), lalu mengukur *competitive advantage* anggot ASEAN, dan penerapan zona ekonomi (*economic zone)*
* BAB III : menguraikan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) sebagai pembangunan ekonomi negara Indonesia.
* BAB IV : menjelaskan dimana posisi Indonesia dan mengukur competitive advantage Indonesia dari segi pembangunan KEK.
* BAB V : penutup, saran dan kesimpulan.
1. Robert Gilpin. 2001. *Global Politic Economy: Understanding The Internasional Economic Order.* New Jersey: Princeton University Press. hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-2)
2. “The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967”, 27 Januari 2016, dalam http://asean. org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/, Diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. ASEAN Document Series 1967-1985, ASEAN Secretariat, Jakarta, 1985, hal 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. United Nation International Development Organization. 2015. *Economic Zone in the ASEAN*.[online] tersedia, dalam, <https://www.unido.org/fileadmin_user_media_upgrade/Resources> /Publication/UCO\_Viet\_Nam\_Study\_Final.pdf [↑](#footnote-ref-5)
5. http://aeccenter .kemendag. go.id/media/177687/ peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf. peluang dan tantangan indonesia. Pasar bebas asean. Masyarakat ekonomi asean. Warta Ekspor Edisi Januari 2015. Diakses pada tanggal 28 februari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
6. “Asean Economic Community Bluprint”, *Association Of South East Sia Nation*, Jakarta 11 November 2010, dalam <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf>.. Diakses pada tangga l 3 januari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
7. United Nation International Development Organization. 2015. *Economic Zone in the ASEAN*.[online]tersedia,dalam,https://www.unido.org/fileadmin\_user\_media\_upgrade/Resources/Publication/UCO\_Viet\_Nam\_Study\_Final.pdf [↑](#footnote-ref-8)
8. ibid [↑](#footnote-ref-9)
9. G. john ikenberry, david A lake & Michel mastanduno, 1988. *Introduction: approaches to explaining American foreign economic policy*. International organization 42, ,1 , winter. The Massachusetts institute of tecnologi and the world peace foundation [↑](#footnote-ref-10)
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 ayat 1. [http://www.bkprn.org/peraturan/the\_file/UU\_No\_39\_Tahun\_ 2009\_Tentang\_ KEK.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No_39_Tahun_%202009_Tentang_%20KEK.pdf). diakses 17 maret 2017 [↑](#footnote-ref-11)
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 2. <http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No_39_Tahun_2009_Tentang_KEK.pdf>. diakses 17 maret 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. pasal 4, ayat 1-4 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. pasal 5, ayat 1-4 [↑](#footnote-ref-14)
14. “Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia”,  *dewan nasional kawasan ekonomi khusus, dalam* <http://kek.go.id/>. Diakses 20 maret 2017 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Kawasn ekonomi khusus Indonesia*:. Dewan nasional kawasan ekonomi khusus. <http://kek.go.id/>. Diakses 23 maret 2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. K.J. Holsti,*Politik Internasional:Suatu Kerangka Analisis*(Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung:Binacipta,1992),hal. 26. [↑](#footnote-ref-17)
17. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005), hal. 7-8. [↑](#footnote-ref-18)
18. Robert Gilpin. 2001. *Global Politic Economy: Understanding The Internasional Economic Order.* New Jersey: Princeton University Press. hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jean Grugel & Wil Hout, (1999), Regions, Regionalism and the South, in Jean Grugel and Wil Hout eds., Regionalism across the North-South Divide: State Strategies and Globalization, London, Routledge, dikutip dalam Rudi Gjuraziu, (2008), Is Regionalism a Stumbling Block or a Stepping Stone in the Processs of Globalization?, Middlesex University, http://www.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/Regionalism%20%20a%20stepping%20stone%20or%20a%20stumbling%20block%20in%20the%20process%20of%20globalisation.pdf, diakses pada 6 maret 2017 [↑](#footnote-ref-20)
20. Anthony Payne, (2003), Globalization and Modes of Regionalist Governance, in David Held & Anthony McGrew, eds, The Global Transformation Reader, An Introduction to Globalization Debate, Polity Press, Cambridge, dikutip dalam Rudi Guraziu, (2008), Is Regionalism a Stumbling Block or a Stepping Stone in the Processs of Globalization?, Middlesex University,http://www.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/Regionalism%20%20a%20stepping%20stone%20or%20a%20stumbling%20block%20in%20the%20process%20of%20globalisation.pdf, diakses pada 7 maret 2017 [↑](#footnote-ref-21)
21. Jan timbergen ( was the first nobel laureate in economics in 1969 ), *internasional economic integration*, ( amsterdam: Elsevier, 1954), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-22)
22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 5 ayat 1-4. <http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No_39_Tahun_2009_Tentang_KEK.pdf> dikases 17 maret 2017 [↑](#footnote-ref-23)
23. Yose rizal damuri, david cristian ,Raymond atje. 2014. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan.* Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, [↑](#footnote-ref-24)
24. [↑](#footnote-ref-25)